

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan dalam sebuah negara merupakan salah satu senjata pamungkas dalam pengaturan suatu negara. Banyak kasus di beberapa negara dengan sistem demokrasi akan sangat membutuhkan pemerintahan sebagai penggerak roda kenegaraan. Dalam kasus di Indonesia, pemerintah dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fungsi serta peranan dua pemerintahan ini memang berbeda meski mempunyai hubungan erat. Pemerintah daerah berperan membantu kinerja pemerintah pusat dalam koridor provinsi atau kabupaten/kota dan diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi yang menyebabkan pemerintah daerah mempunyai andil serta kontribusi yang lebih banyak dalam mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri. Hal ini didasari adanya keinginan serta kebebasan dalam mengatur pemerintahannya sendiri tetapi setiap daerah dengan teritorial tertentu akan lebih leluasa dalam proses perwakilan serta dalam penanganan hal-hal berskala keaderahan. Maka dari itu defini dari desentralisasi menjadi lebih luas bukan hanya pelimpahan wewenang tetapi juga adanya kebebasan dalam kepengurusan daerah yang dinyatakan oleh Rondinelli dalam Rauf (2018, p. 65)

Desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat menimbulkan lahirnya otonomi daerah. Desentralisasi yang mengotonomikan kebijakan menjadi lebih sesuai dengan keadaan serta permasalahan di daerah tersebut. Otonomi yang lahir karena adanya pelimpahan kewenangan akan saling berkaitan, hal ini dinyatakan oleh Gerald S. Maryanov dalam Hidayat (2019, p. 2). Adanya otonomi khusus pada setiap daerah sesuai prosedur desentralisasi yang baik bukan dimaksud dengan lepas tangannya pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahan, tetapi lebih pada memberikan suatu kewenangan dimana daerah yang lebih mampu mengatasi masalah yang lebih spesifik, dimana setiap

daerah mempunyai sektor-sektor pembangunan dan masalah yang beragam dan berbeda. Pemerintah pusat masih ikut andil dalam kepentingan yang telah diatur oleh undang-undang yang sudah ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat.

Salah satu persoalan dalam sistem desentralisasi adalah penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya masalah kesejahteraan sosial terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah ekonomi. Kurangnya konsentrasi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan akan menyebabkan timbulnya kesenjangan dalam ranah pelayanan sosial yang ada.

Tak ketercuali Kabupaten Trenggalek, masalah kesejahteraan sosial masih erat kaitannya dengan kondisi ekonomi dan geografis masyarakat. Angka kemiskinan di kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 yang menunjukkan angka yang belum terlalu baik yaitu 10,98 persen, meski turun 1,04 persen dari tahun 2018. Penurunan angka kemiskinan tersebut telah menunjukkan bahwa kabupaten Trenggalek berusaha meningkatkan kinerja pembangunan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang baik.

Tabel 1. 1 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Trenggalek

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam satuan ribu)	Persentase
2010	108	16,00
2011	101,20	14,90
2012	96,61	14,16
2013	92,42	13,50
2014	90,04	13,10
2015	92,17	13,39

2016	91,49	13,24
2017	89,77	12,96
2018	83,50	12,02
2019	76,44	10,98
2020	81,06	11,62

(Sumber: Survei Kesejahteraan Nasional (Susenas) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2020)

Penyelenggaraan setiap pemerintah daerah mempunyai sistem dan landasan hukum yang berbeda meski tetap ada koordinasi dan kontrol dengan pemerintahan pusat. Salah satu masalah yang banyak ditemui diberbagai daerah adalah kemiskinan. Adanya kemiskinan berhubungan erat dengan ketidak stabilan perekonomian serta sistem pembangunan yang tidak merata. Hal ini dinilai sangat kompleks dan menyeluruh karena kemiskinan berhubungan dengan sistem perekonomian, sosio-politik, serta sistem pembangunan yang belum terealisasi dengan baik. Melihat dari kasus tersebut, pemerintah pusat berusaha untuk membentuk struktur sistem dan program progresif dengan membuat suatu lembaga khusus yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kemiskinan yang berhubungan langsung dengan masyarakat membuat pemerintah pusat memerlukan bantuan dari pemerintah daerah untuk ikut mengatasi masalah tersebut. Meski adanya desentralisasi serta pemberian hak-hak otonom, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengontrol, pemberian standart, kriteria, serta tata cara penanganan (Hoessein, 2005, p. 120)

Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek juga mempunyai cara tersendiri dalam penanganan masalah-masalah daerah seperti kemiskinan. Melihat dari kondisi geografis Kabupaten Trenggalek sebagai daerah pesisir yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Sumber daya alam yang melimpah dimana terdapat lautan dan lahan pertanian yang luas serta pegunungan yang sebagian sudah beralih fungsi sebagai lahan perkebunan, tidak membuat Kabupaten Trenggalek terhindar dari masalah

bidang perekonomian dan pembangunan. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang kurang tepat membuat sebagian masyarakat Trenggalek masih berada di dalam lingkaran kemiskinan. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Trenggalek masih ada di kategorikan masyarakat miskin karena minimnya tingkat pendidikan dan banyaknya pengangguran. Kedua adalah dana serta produk bantuan kemiskinan yang masih kurang dalam hal jumlah dan belum tepat sasaran. Banyak masyarakat miskin yang belum terdata mengakibatkan bantuan kurang dirasakan terutama pada masyarakat yang ada di daerah pegunungan. Hal ini juga berhubungan dengan data penduduk miskin yang belum tnetu diperbaharui secara berkala atau bahkan tidak *valid*.

Untuk menangani pengentasan kesejahteraan sosial di tingkat daerah, maka pemerintah daerah juga mempunyai cara khusus atau program yang dibuat langsung oleh kepala daerah serta jajarannya dan dilaksanakan oleh masyarakat daerah tersebut. Dalam kasus penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Trenggalek yang mana masih mempunyai indeks kemiskinan yang tinggi, maka pemerintah daerah setempat membuat program khusus yang dipraakarsai oleh Bupati Emil Dardak dan Wakil Bupati Mochammad Arifin berupa Gerakan Tengoh Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK). Gerakan tersebut berada dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) Kabupaten Trenggalek. Program ini terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. Gerakan ini mempunyai lembaga serta kantor khusus yang terdapat di lingkup kantor Sekretaris Daerah.

GERTAK sebetulnya merupakan evaluasi dari program pengentasan kemiskinan sebelumnya dimana terdapat beberapa perubahan serta kelebihan dalam hal teknis dan juga penanganan sosial dalam hal penanggulangan kemiskinan. Teknis yang lebih *diupgradem* menggunakan data resmi yang lebih akurat dapat membantu pengelolaan dana bantuan lebih tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena jika data yang diberikan tidak sesuai akan banyak bantuan yang salah sasaran atau kurang bermanfaat. Pemberdayaan serta penanganan

sosial juga lebih difokuskan dengan sistem pemberdayaan masyarakat yang lebih terstruktur. Meski program ini dulunya dipandang sebelah mata karena dilihat masyarakat lebih mengarah ke unsur politik yang mana pendiri sekaligus kepala program ini adalah bupati dan wakil.

Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan atau yang disebut dengan GERTAK adalah wujud sinkronisasi semua organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan kerentanan. Hal ini disampaikan langsung oleh pelopor dari program ini yaitu Muchammad Arifin sebagai wakil bupati di lansir pada wartaberita online Surya.co.id.

“Tentunya hal ini tidak lepas dari peran serta semua pihak, melalui upaya penanganan kemiskinan terpadu Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dan Kerentanan atau Gertak” (Muchammad Arifin, 2019)

Menurut Bupati Trenggalek tersebut, kedepannya pemerintahan daerah berfokus pada pemberdayaan perempuan dan masyarakat usia produktif. Pemilihan perempuan sebagai masyarakat yang diberdayakan mempunyai sebab yaitu penghasilan perempuan yang diberdayakan secara ekonomi akan kembali lagi kepada anaknya dan keluarga.

Operasional dari GERTAK sendiri mengadopsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu atau bisa disingkat SLRT. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Mesin Nasional dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Pelayanan Publik. Sistem Informasi Sistem Informasi Pelayanan Publik, adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi, serta lisan atau tulisan latin, braille, bahasa bergambar, dan/atau bahasa daerah, serta menyajikannya secara manual atau elektronik. Sistem ini merupakan kesatuan layanan sosial melalui web resmi GERTAK dan dapat dilihat oleh masyarakat umum. Dalam sistem tersebut, terdapat infografis yang menyajikan data pengaduin yang telah

diterima atau ditolak, data kemiskinan tiap daerah, peta alokasi tingkat ekonomi masyarakat, juga smart link dari organisasi perangkat daerah yang terkait dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial seperti Basnaz Trenggalek, Forum Kabupaten Sehat, Smart Desa, dan TKPK Trenggalek. Pelacakan dari laporan juga tersedia dengan hanya memasukkan kode laporan yang sudah diterima.

Dalam penelitian terdahulu sudah banyak membahas tentang GERTAK mulai dari efektivitas pelayanan sampai korelasi antara perencanaan pembangunan dan politik daerah dikarenakan GERTAK merupakan suatu program yang diprakarsai oleh bupati dan wakil bupati disaat pencalonan kepala daerah. Namun sejauh ini, belum ada yang membahas bagaimana keefektivan dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang diaplikasikan pada program pengentasan masalah kesejahteraan sosial di GERTAK. Penanganan masalah kesejahteraan sosial bukan hanya sekedar pemberian bantuan tetapi juga adanya tindak lanjut berupa pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan ekonomi produktif skala daerah. Hal ini dapat dilakukan jika data masyarakat yang masih kurang dalam hal kesejahteraan sosial pada terpadu dan sistematis membentuk ekosistem pelayanan yang terpusat serta multifungsi dengan merangkul semua pelayanan sosial menjadi pelayanan satu pintu. Pelayanan satu pintu yang mudah diakses dan dalam operasionalnya menjadi lebih ringkas akan lebih mempercepat gerak pemerintah daerah dalam pengentasan masalah tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa GERTAK menjadi sorotan publik pada dewasa ini. Pertama, awal mula program ini sebagai bentuk kampanye calon pemimpin terpilih Emil Dardak dan Muchammad Nur Arifin. Hal ini menimbulkan asumsi publik mengenai politisasi di tingkat daerah. Sampai pada program tersebut dimasukkan ke Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada bidang masalah sosial. Faktor lain dikarenakan daerah Trenggalek merupakan wilayah pesisir yang masyarakatnya kurang diberdayakan, sehingga belum mampu

untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Masalah ini menimbulkan dampak kemiskinan yang berkelanjutan. Masyarakat yang tergolong dalam ekonomi rendah belum mampu untuk melakukan hal-hal dasar seperti mencari jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan sebagai pelayanan sosial. Kebutuhan dasar atas pelayanan sosial ini yang menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk berinovasi. Inovasi pelayanan publik dibidang sosial ini lebih mengutamakan untuk mencakup semua kalangan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi atau geografis seperti letak tempat tinggal yang jauh dari pusat pelayanan. Maka dari itu calon bupati dan wakil bupati terpilih mempunyai inovasi dalam menjembat bola masalah sosial ketimbang menunggu adanya laporan dari daerah terdekat seperti RT atau desa.

Hal ini dibuktikan dengan adanya sinkronisasi terkait data dari smart data kependudukan yang nantinya dimasukkan dalam beberapa layanan kebutuhan dasar sesuai dengan masalah sosial yang terjadi, seperti adanya penduduk yang kesulitan dalam mencari Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS, kependudukan, bantuan sosial dan kebutuhan dasar lainnya. Sistem yang kompleks dalam penyelarasan data sampai pada pelayanan pemberian bantuan perlu adanya banyak perangkat daerah yang terlibat, dengan pusat koordinasi yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek untuk pemberian pelayanan sosial yang nantinya akan didistribusikan pada dinas terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adanya tindakan konkrit dari pemerintah daerah terkait penanganan masalah kesejahteraan sosial sebagai salah satu proses pembangunan pemerintahan daerah akan lebih dimudahkan dengan adanya inovasi pada sistem pelayanan. Hal ini juga terkait dengan bagaimana cara pemerintah daerah mengenali kondisi masyarakat serta geografis yang ada untuk lebih mengoptimalkan pelayanan sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Trenggalek yang dahulu merupakan daerah tergolong tinggi dalam hal jumlah penduduk miskin dan pelayanan sosial yang kurang

terpadu. Sumber daya alam yang melimpah belum dapat dikelola dengan baik dikarenakan sumber daya manusia yang kurang mumpuni serta pemberdayaan yang kurang maksimal dari organisasi perangkat daerah terkait. Kemiskinan dan kurangnya pelayanan merupakan faktor dibentuknya GERTAK sebagai wadah pelayanan masalah kesejahteraan sosial yang melingkupi beberapa bidang seperti pemberdayaan perempuan, gender, dan perlindungan anak, bantuan masyarakat miskin, dan pelayanan jaminan kesehatan serta catatan sipil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini mengajukan sebuah pertanyaan: Bagaimana Efektivitas Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan (GERTAK) Dengan Menggunakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan (GERTAK) dengan menggunakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Trenggalek Pada Tahun 2017-2021. Penelitian ini mempunyai fokus studi kasus di Dinas Sosial Pemberdayaan Pemampuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek sebagai perangkat daerah yang mengampu program tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya berhubungan dengan efektivitas pemerintah daerah dalam hal pengentasan masalah kesejahteraan sosial melalui Gerakan Tengok Masalah Kemiskinan (GERTAK) dengan menggunakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) pada tahun 2017-2021 di Kabupaten

Trenggalek. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang relevan untuk penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pemerintah daerah dalam rangka strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam bidang pengentasan masalah kesejahteraan kepada masyarakat dan menjadi acuan untuk terus memperbaiki pelayanan publik serta kinerja pembangunan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

b) Bagi Aparatur Sipil Negara

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Trenggalek dalam tugasnya sebagai pelayanan publik untuk memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu, bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai kurang maksimal oleh masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Link Jurnal
1.	Suahasil Nazara (2014)	Peran Penting Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan sangat erat hubungannya dengan pola serta sistem pemerintahan terutama pemerintahan daerah yang secara langsung lebih dekat dengan masyarakat daerah tersebut. kedekatan terlihat dari bagaimana pelayanan publik yang ada di daerah tersebut berjalan dengan baik atau masih kurang mampu menaungi seluruh lapisan masyarakat. Faktor kedua adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat mengelola sumber daya alam dan manusia dengan baik atau tidak. Sumber daya yang tersedia dengan dibarengi sistem pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang baik dapat menekan angka kemiskinan karena masyarakat lebih terampil dalam pemenuhan kebutuhan. Ketiga adalah bagaimana pemerintah mampu menghasilkan pendapatannya sendiri. adanya lembaga kabupaten yang berfokus pada pengentasan kemiskinan seperti TKPK.	http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Peran%20Peran%20Penting%20Pemerintah%20Daerah%20dalam%20Penanggulangan%20Kemiskinan-1.pdf
2.	Wahyu Dewi Kesuma Eva Hany Fanida, S,AP.,MAP (2018)	Manajemen Strategi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di	Pembentukan Program GERTAK dilatarbelakangi oleh adanya faktor yang mendorong tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek yaitu tingkat pendidikan yang masih rendah serta belum menyeluruh, data penduduk miskin yang belum diperbaharui setiap tahun, serta	Publika Vol 7 No 1 (2019) https://doi.org/10.26740/publika.v7n1.p%25p

		Kabupaten Trenggalek	sasaran bantuan kemiskinan yang tidak tepat. Dalam pelaksanaannya, GERTAK mempunyai tahapan strategi sistem yang saling terintegrasi yaitu Golden Standard dan klasifikasi kemiskinan, mekanisme mutasi, unit pelayanan terpadu, bina ekonomi rakyat, serta redefinisi dan evaluasi.	
3.	Nurul Aini dan Pambudi Handoyo (2018)	Hegemoni Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK)	GERTAK merupakan program inovasi yang mana program ini memerlukan pendekatan sosiologis langsung dengan masyarakat Trenggalek khususnya warga miskin. Dalam prosedur penyelenggaraannya, adanya Poko Terpadu GERTAK, mensosialisasikan Jaminan Kesehatan (KIS), serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan sumber daya alam daerah tersebut dengan pendekatan musyawarah desa dapat membuat GERTAK menjadi suatu gerakan yang dirasa sangat dekat dan <i>pro</i> dengan masyarakat.	Paradigma Vol 7 No 2 (2019) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/28365
4.	Deni Hayu Aprillianingtyas (2017)	<i>Rural Poverty Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek</i>	Program GERTAK dapat merubah pola pikir masyarakat dalam memecahkan masalah kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Masyarakat yang dulunya mengharapkan bantuan dari pusat serta swasta, sekarang dapat membantu dirinya sendiri bangkit dari kemiskinan dengan bantuan langsung dari daerah yang bekerja sama dengan beberapa elemen penting pemerintah daerah serta adanya pemberdayaan masyarakat	Thesis http://eprints.ummm.ac.id/id/eprint/35926

5.	Ahmad Yuzki Arifian Nawafi', S.IP (2018)	Politisasi Institusional Percepatan Pengentasan Kemiskinan Posko GERTAK Di Kabupaten Trenggalek	Politisasi Institusional yang terjadi dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, yaitu : a. Bupati dan Wakil yang terpilih membentuk sebuah lembaga <i>ad hoc</i> yang berada di bawah Wakil Bupati Trenggalek, sehingga kontrol dan pengawasan terhadap birokrasi lebih leluasa oleh politisi; b. Pemenuhan janji kampanye Bupati dan Wakil terpilih dalam mendukung program kemanusiaan yang telah dilakukan oleh komunitas Ikatan Sedulur Trenggalek; c. Program percepatan pengentasan kemiskinan merupakan agenda untuk mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil, sehingga politisi mendayagunakan seluruh aspek birokrasi untuk mencapai tujuan tersebut.	Thesis http://repository.unair.ac.id/id/eprint/79865
6.	Josef Papilaya (2020)	Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan)	Penanganan kemiskinan tidak hanya melihat dari sisi pendapatan perkapita yang diterima, namun perlu adanya pendekatan menyeluruh dalam memandang kemiskinan dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan letak geografis suatu daerah. Jadi untuk menangani kemiskinan, tidak bisa menerapkan kebijakan penanganan kemiskinan secara umum, namun kebijakan harus dirancang sesuai dengan karakteristik kemiskinan di daerah tertentu. Dengan melihat karakteristik kemiskinan yang berbeda, maka akan diperoleh informasi lengkap tentang potret kemiskinan yang sesungguhnya.	Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Vol 4, No.1 (2020) DOI: http://dx.doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1113 https://ojs.unpat ti.ac.id/index.php/bkt/article/view/1113/553

7.	I Wayan Sutrisna (2018)	Mewujudkan Pembangunan Partisipatif dalam Penanggulangan Masalah Kemiskinan Di Era Otonomi Daerah	Model pembangunan yang partisipatif merupakan pemecahan masalah dalam mengatasi ketidak merataan pembangunan dan masalah kemiskinan. Pola ini akan mampu menekan jumlah masyarakat miskin karena seluruh masyarakat sudah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan proses pembangunan, mewujudkan pembangunan yang partisipatif harus diusahakan oleh setiap PEMDA, karena hasilnya dapat dinikmati merata. Pola ini diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas sehingga tingkat kemiskinanpun akan mampu ditekan secara maksimal.	Jurnal Cakrawarti, Vol. 01, No. 01 (2018) http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/download/104/101
8.	Sujarwo, N. A. C., Mahsuni, A. W., & Mawardi, M. C. (2017)	Nalisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2015.	Rasio Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2013-2015 dengan hasil tingkat rata” sebesar 27.80%, menggambarkan kinerja masih sangat rendah memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah.	Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol 6, No. 03 (2017) http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/342
9.	Baroroh, U. U., & Jannah, A. U. (2017).	Menjawab Peran Institusi Sosial Dalam Penanggulangan Kontestasi Kemiskinan Melalui Institusi Sosial.	Kemiskinan terjadi tidak seluruhnya bersifat multidimensi hingga penting dilakukan dengan perubahan menjadi tindakan yang bermanfaat dalam metode jejaring sosial kehidupan. Memutuskan mata rantai kemiskinan dilakukan melalui kegiatan kreatif, inovatif, dan produktif sejalan serta selaras dengan kemauan dan tekad	Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Vol. VI No.1 (2017) https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/122

			<p>masyarakat secara sadar (aware) untuk bangkit (survive) secara mandiri dan mampu mendinamisasi diri secara lebih luas. Mampu berdikari mengelola dan mengoptimalkan sumberdaya lokal yang dimiliki juga dengan sinergi para stake holder sebagai penghubung dan siap melayani masyarakat serta mendampingi (vokasi) menyelesaikan masalah aktual dan terutama pada gejala kemiskinan yang kian masif akhir-akhir ini. Dapat juga dilakukan jalinan kerjasama dengan lembaga sosial, membentuk komunitas lokal, melakukan kegiatan amal dan hibah barang (fundraising/charity), bonus demografi dan kegiatan sosial lainnya. Di harapkan dengan semua itu akan berimplikasi atau berdampak bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi secara komprehensif.</p>	
10	Satrio Mansyur (2013)	Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik	<p>Suatu organisasi birokrasi yang dapat secara efektif dan efisien memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, salah satunya adalah desentralisasi daripada sentralisasi. Sebab, melalui struktur desentralisasi diharapkan akan lebih mudah untuk memprediksi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga birokrasi dapat dengan cepat memberikan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat pelanggan. Pada saat yang sama, dalam</p>	<p>Jurnal Academica Fisip Untad Vol.05 No.1 (2013) http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/viewFile/2259/1460</p>

			konteks persyaratan budaya organisasi birokrasi, perlu disiapkan tenaga kerja atau organisasi yang benar-benar cakap, menguntungkan, loyal, dan menguntungkan).	
--	--	--	---	--

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas sebagian besar berfokus pada penyelenggaraan Program GERTAK dan peran pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial lainnya, akan tetapi dari sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang fokus membahas tentang “Efektivitas Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan (GERTAK) Dengan Menggunakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Trenggalek” maka dari itu penelitian ini bukanlah hasil dari pemikiran orang lain, akan tetapi penelitian ini menjadi penelitian baru yang datang pemikiran peneliti sendiri. Perbedaan yang dari penelitian sebelumnya adalah membahas dan menganalisis lebih dalam mengapa program pengentasan masalah sosial pada GERTAK yang mengadopsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dapat menjadikan program tersebut lebih efektif. Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini menarik dan berbeda dari sebelum sebelumnya, karena penelitian kali ini berfokus pada efektif atau tidaknya efektivitas Program GERTAK yang menggunakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Trenggalek.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah atau dalam beberapa konsep disebut dengan Local Government adalah suatu lembaga yang menjalankan, mempunyai hak, serta wewenang untuk menjalankan roda birokrasi dan pelayanan publik (pemerintahan) di sektor daerah. Istilah Local Government mengandung tiga pengertian yaitu pemerintah lokal, pemerintahan lokal, dan wilayah lokal yang dinyatakan oleh Hoessein dalam Nurcholish (2005, p. 24) Sistem desentralisasi

yang diterapkan oleh pemerintah pusat terhadap daerah mengakibatkan muncul hak dan wewenang otonom daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, meski ada beberapa aspek yang masih dalam kontrol dan diurus oleh pemerintahan pusat.

Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah membuat beberapa aturan yang merupakan bentuk dari kebijakan untuk mengatur masyarakat pada daerah tersebut. Adanya pembuatan kebijakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut dengan fungsi legislatif. Sedangkan bidang eksekutif berada pada Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pantja dalam Maryati (2017, p. 68) menyatakan bahwa dasar kewenangan administrasi negara mengeluarkan peraturan kebijakan adalah bersumber dari kebebasan bertindak (*freies ermessen*) yang dimiliki oleh administrasi negara. Sejalan dengan perkembangan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memberi peluang lebih besar kepada administrasi negara untuk melaksanakan *freies ermessen* dalam rangka menyelenggarakan public servis, maka semakin nampak menonjol instrumen penyelenggaraan kebijakan administrasi negara. Pembuat kebijakan merupakan pejabat yang dipilih melalui sistem pemilihan umum sedangkan pelaksana kebijakan merupakan pejabat yang diangkat oleh kepala daerah yang ditanyakan oleh Hossein dalam Nurcholish (2005, p. 24)

1.6.2 Masalah Kesejahteraan Sosial

Menurut Richard Titmuss dalam Rustanto (2007, p. 6) kesejahteraan sosial adalah kemampuan masyarakat untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah sosial. Sehingga jika masyarakat mampu, masyarakat akan lebih sejahtera dari masyarakat lainnya. Kesejahteraan sosial terjadi pada masyarakat yang dapat menciptakan peluang sosial bagi penduduk untuk meningkatkan dan mewujudkan potensi yang ada. Orang dengan masalah kesejahteraan sosial adalah individu atau keluarga yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya karena hambatan, kesulitan atau kekacauan, sehingga tidak dapat menjalin hubungan yang harmonis dan kreatif dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari (fisik, mental, dan sosial). dan sosial) secara utuh dan adil. PMKS merupakan salah satu masalah sosial yang

harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Hal ini karena PMKS erat kaitannya dengan kemiskinan. Karena PMKS meliputi anak terlantar, anak yang melanggar hukum, anak yang terlantar di bawah hukum, anak jalanan, lansia terlantar, pengemis, gelandangan, pengguna narkoba, pelacur, mantan penjahat, penyandang cacat, dan anak cacat. keluarga dengan masalah sosial, psikologis, anak korban kekerasan, perempuan kurang mampu secara sosial ekonomi, korban bencana alam, korban bencana sosial, minoritas, pemulung, dan korban kekerasan (Kemensos, 2012, p. 4) .

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Menurut Suharto (2006, p. 27), kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau upaya terencana bagi individu, lembaga sosial, masyarakat, dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan pelayanan sosial dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan terorganisir yang meningkatkan kesejahteraan sosial dengan membantu orang memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak dalam kehidupan, kesehatan, adaptasi sosial, dan layanan kesejahteraan sosial, dengan fokus pada individu, kelompok, komunitas, dan masih banyak lagi (Suud, 2006). Sementara itu, Suharto dalam Pathony menyatakan bahwa di Indonesia, kesejahteraan sosial sering dianggap sebagai tujuan atau syarat hidup sejahtera, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. (2019, p. 273)

1.6.3 Efektivitas Sistem Layanan

Efektivitas menunjukkan bahwa keberadaan suatu produk atau jasa memenuhi atau memuaskan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dalam keadaan tertentu. Efektivitas menekankan pada pencapaian hasil atau tujuan yang benar. Efektivitas adalah dengan secara sadar menentukan penggunaan sejumlah sumber daya, sarana dan prasarana terlebih dahulu untuk

menghasilkan beberapa barang untuk jasa yang diberikannya. Efektivitas didasarkan pada apakah tujuan yang ditetapkan telah dicapai untuk menunjukkan keberhasilan. Jika hasil kegiatan lebih mendekati tujuan, berarti efektivitasnya lebih tinggi (Siagian, 2001, p. 24).

Efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa indikator (Sutrisno, 2007, pp. 125-126), yaitu:

1.6.3.1 Pemahaman program.

Budiani dalam Pertiwi (2017, p. 3) menyatakan bahwa pemahaman terhadap suatu program yang akan dijalankan dilihat dari kemampuan penyelenggara program untuk mensosialisasikan program dalam rangka menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program kepada masyarakat luas, khususnya sasaran peserta program.

1.6.3.2 Tepat sasaran

Adanya standar atau ukuran yang efektif atau tidak efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yaitu kejelasan tujuan yang ingin dicapai, kejelasan strategi yang merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan program, analisis dan ukuran yang harus diikuti ketika berusaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi, perumusan kebijakan yang matang merupakan upaya yang dapat mengaitkan tujuan dengan upaya pelaksanaan kegiatan usaha, perencanaan yang matang, penyusunan rencana yang tepat, ketersediaan sarana dan prasarana kerja serta pengawasan dan pengendalian yang konsisten (Siagian, 2001).

1.6.3.3 Ketepatan waktu

Abdurahmat (2003, p. 92) mengemukakan tentang efektivitas secara sadar menentukan terlebih dahulu tingkat pemanfaatan sejumlah sumber daya sarana dan prasarana untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan yang terarah dan tepat waktu.

1.6.3.4 Tercapainya tujuan.

Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam usahanya mencapai tujuan atau sasarannya dinyatakan oleh

Meiner dalam Sucoko (2020, p. 3). Melalui perencanaan yang efektif dan efisien, pelaksanaan tugas organisasi semakin mendekati tujuan yang diharapkan. Jika tujuan atau goal tersebut sesuai dengan rencana sebelumnya maka dapat dikatakan efektif atau sebaliknya.

1.6.3.5 Perubahan yang nyata.

Efektivitas mengacu pada proses pencapaian tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditentukan dan jumlah personel yang ditunjuk (Effendy, 2003). Jika ketiga hal tersebut dapat dilaksanakan dengan benar, maka sebuah rencana dapat terwujud. Keberhasilan suatu program dilihat dari adanya efek atau dampak kegiatan tersebut terhadap masyarakat setempat atau sasaran program dan perbedaan keadaan dari sebelum program itu direalisasikan.

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi. Ini adalah kombinasi dari orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan kontrol. Ini dirancang untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, menangani jenis transaksi harian tertentu, manajemen internal, dan faktor eksternal yang penting memberikan dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang baik (Jogiyanto, 2005). Sinambela dalam Firmansyah (2018, p. 208) menyatakan bahwa pelayanan berasal dari kata “service” yang berarti segala sesuatu yang diperlukan untuk membantu memberikan perilaku pelayanan orang lain. Pada dasarnya setiap orang membutuhkan pelayanan, bahkan dalam kasus yang ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. P

Ada prinsipnya pelayanan pengaduan masyarakat yang diberikan kepada pemerintah bertujuan untuk memudahkan bagi yang menyampaikan pengaduan dengan menyediakan layanan hotline, fax dan website sebagai sarana untuk mempermudah pengaduan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Thoha dalam Mursalim (2018, p. 4), pelayanan publik adalah upaya individu, kelompok atau lembaga untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu Suaib

dalam Mursalim (2018, p. 5). Memberikan pelayanan kepada kebutuhan orang atau masyarakat yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan aturan dasar dan prosedur yang telah ditetapkan (Handoyo, 2012, p. 170).

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Pemerintah Daerah

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan pengertian pemerintah daerah adalah organisasi penyelenggara pemerintah di daerah yang berwenang memimpin dan menyelenggarakan setiap urusan daerah di satu wilayah tertentu dengan dipimpin oleh kepala daerah.

1.7.2 Masalah Kesejahteraan Sosial

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masalah kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan dimana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan baik dasar maupun kebutuhan sekunder yang mengakibatkan individu tersebut kekuarangan sumber daya pangan, tempat tinggal, dan sosial.

1.7.3 Efektivitas Sistem Layanan

Efektivitas yang diambil dari kata kunci “efektif” merupakan gambaran dari suatu pekerjaan atau tingkah laku yang menghasilkan outcome yang baik. Sedangkan Sistem Layanan adalah suatu usaha dari organisasi penyedia layanan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan secara umum dan merata. Efektivitas sistem layanan dalam lingkup ini menggambarkan bagaimana kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek dalam hal penanganan masalah sosial melalui sistem SLRT Program GERTAK. Dengan demikian, maka diharapkan bahwa dalam hal keefektivitasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama terkait tindak lanjut peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari output yang dihasilkan.

1.8 Definisi Operasional

Untuk mengukur efektivitas sistem layanan pada program GERTAK yang mengadopsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan

penyanggah masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Trenggalek, maka penelitian ini menggunakan indikator dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2007) tentang tolak ukur efektivitas suatu program, antara lain:

Tabel 1. 3 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Efektivitas Sistem Layanan Rujukan Terpadu pada Program GERAK	Pemahaman Program	Pemahaman Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai alur koordinasi pada program GERTAK oleh segenap pelaksana layanan di Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek dan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut (sasaran program).
	Tepat sasaran	Tujuan dari program GERTAK yang mengadopsi SLRT dapat tercapai dan sesuai dengan yang dikehendaki.
	Tepat waktu	Layanan yang dilakukan tepat waktu berdasarkan standart prosedur pelayanan yang berlaku sesuai dengan harapan.
	Tercapainya tujuan	Pencapaian tujuan yang telah dijalankan
	Perubahan nyata	Perubahan nyata dilihat daridampak setelah adanya SLRT dalam program GERTAK.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Fokus penelitian ini mengetahui bagaimana efektivitas program GERTAK yang menggunakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Karena masalah, tujuan, dan karakteristik penelitian ini berhubungan dengan mutu (baik/buruknya) suatu program maka dipandang lebih tepat diselesaikan dengan mempergunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sugiyono, 2013, p. 7). Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Selanjutnya sumber data dari informan yang ditunjuk melalui tahap proses klasifikasi dan reduksi data, lalu proses pengolahan data dan terakhir proses analisis data dan perumusan hasil penelitian dan kesimpulan. Pendekatan yang peneliti ambil berupa deskriptif yang mana seluruh data dan proses analisis akan memperlihatkan bagaimana efektivitas SLRT pada program GERTAK sebagai upaya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara akurat dan sesuai dengan data yang didapatkan oleh peneliti.

1.9.2 Unit Analisa

Unit analisa merupakan objek yang akan diteliti menyesuaikan pada pokok permasalahan yang diambil oleh peneliti. Penelitian ini mengambil unit analisa atau objek dari penelitian adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

1.9.3 Data dan Sumber data

a) Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang mana semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian. Data primer (*primary data*) adalah suatu objek atau dokumen original material menatah dari pelaku yang disebut *first hand information* (Sugiyono, 2013, p. 225)

Tabel 1. 4 Data Primer

No	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) pada	Bangkit Deni Setyawan (Kepala Koordinator)	Wawancara

	Program Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan (GERTAK)	Pelayanan Posko Gertak Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek)	
2	Data Kemiskinan dan Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas terkait dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebelum adanya GERTAK	Mustofa, SE. (Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas P3A Kabu. Trenggalek)	Wawancara

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini melalui internet mupun secara langsung, jurnal, buku-buku dan arsip-arsip yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Tabel 1. 5 Data Sekunder

No	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Rekap Pelaporan Posko Gertak 2020	TKPKD Kabupaten Trenggalek dan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek	Studi Pustaka
2	Perlindungan Sosial dan Peran TKPK	TKPKD Kabupaten Trenggalek, Dinsos, dan Pemda	Studi Pustaka

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013, p. 293). Berikut merupakan teknik pengumpulan data :

- Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian. Untuk menghindari hilangnya informasi atau kelupaan informasi, peneliti meminta ijin kepada narasumber untuk menggunakan alat dokumentasi yang berupa alat perekam dan kamera. Sebelum dilakukannya wawancara, peneliti akan memaparkan secara singkat mengenai topik penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Koordinator Pelayanan di Posko GERTAK Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek.

- Studi Dokumentasi

Istilah ini berasal dari kata “dokumen” yang berarti barang tertulis. Teknik ini juga merupakan tata cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada. Hal ini dikarenakan data dalam dokumen juga menyimpan data dengan mencatat data-data yang sudah ada yang bisa digunakan untuk penelitian. Studi dokumentasi juga biasa disebut juga dengan pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Teknik ini adalah menjelaskan informasi yang berasal dari catatan penting baik lembaga atau organisasi maupun perorangan. (Sugiyono, 2013, p. 225). Studi dokumentasi pada penelitian ini diperoleh dari TKPKD Kabupaten Trenggalek, Dinsos, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.

1.9.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan sebagai upaya menyusun data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013, p. 293). Adapun teknik analisis data dalam metode penelitian kualitatif antara lain wawancara, reduksi data, penyajian data

menggunakan dokumen asli daerah serta hasil dari wawancara, dan verifikasi data yang akan digunakan sebagai kesimpulan dari data-data yang disajikan.